

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA LAHAN RRI

Nomor : 123 / RRI- CN / PNBP-PKS / 11 / 2023

Pada hari ini Rabu 1 November 2023 (Satu November Dua Ribu Dua Puluh Tiga)

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon berkedudukan di Cirebon dengan alamat Jalan Brigjend Dharsono By Pass Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh : Dra, Besty Charmin Simatupang, M.Si selaku Kepala RRI Cirebon yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Selanjutnya pihak penyewa atas nama :**Tunani Agustin**

Pekerjaan	: Wiraswasta
No KTP	: 3209215208840014
Alamat	: Blok Karang Baru RT 01/ 06 Desa Mertasinga Bondet Kabupaten Cirebon, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa lahan di Jalan Fatahilah Kec. Weru Kabupaten Cirebon dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

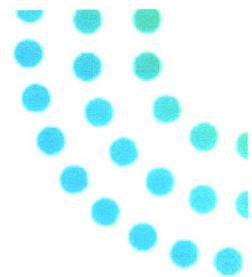
1. Pihak pertama menyetujui lahan space luas 56 M² oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** di Jalan Fatahilah/ Plered Desa Weru Kec. Weru Kab. Cirebon, untuk digunakan tempat usaha warung makan Atun seafood.
2. Bahwa untuk kepentingan kelengkapan warung menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

PASAL II HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjamin bahwa lahan yang disewa **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik, dan tidak boleh menambah atau mengurangi luas tanah sesuai yang direkomendasikan KPKNL, tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** mengijinkan sewa lahan setelah mengikuti prosedur diterbitkannya surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon dengan No : S-014/MK.6/ WKN 08/ KNL. 06/ 2017.

PASAL III HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib memelihara kebersihan lingkungan tempat sewa , dan sekelilingnya
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar uang sewa tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.



3. **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan lahan yang digunakan usaha tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, jika sewaktu waktu lahan tersebut / tanah tersebut akan digunakan oleh kepentingan Negara (**PIHAK PERTAMA**) dengan tidak menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL IV HARGA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak setuju sewa lahan seperti yang dimaksud dalam perjanjian sewa lahan untuk, warung makan Atun Seafood, sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) pertahun sesuai yang tertera dalam SK dari KPKNL Cirebon No : S-014/ MK.6/ WKN 08/ KNL. 06/ 2017.
2. Pembayaran harga sewa dilakukan setiap tahun di akhir jatuh tempo yang telah di sepakati sesuai tanggal penandatangan perjanjian ini, ke **PIHAK PERTAMA** melalui Petugas penyetor PNBP RRI Cirebon yang selanjutnya langsung di setorkan ke kas Negara.

PASAL V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

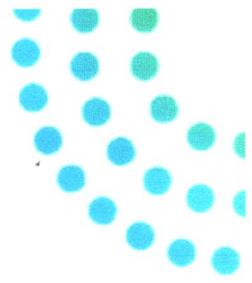
1. Perjanjian sewa lahan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai perjanjian ini di tanda tangani, sampai batas akhir jatuh tempo yaitu 31 Oktober 2024 dan dapat di perpanjang sesuai kesepakatan para pihak, dengan harga masih mengacu kepada SK KPKNL Cirebon No : S-014/ MK.6/ WKN 08/ KNL. 06/ 2017, dan jika SK tersebut masa berlakunya berakhir, untuk keputusan harga tetap menunggu hasil analisa pihak KPKNL yang kemudian **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan harga baru
2. Apabila akan berahir masa sewa **PIHAK PERTAMA** berhak mengingatkan kepada **PIHAK KEDUA** Tiga bulan sebelum masa sewa berakhir, atau sebaliknya **PIHAK KEDUA** memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa harga sewa akan berahir.

PASAL VI PENYELSAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dalam ketentuan ketentuan perjanjian ini, maka keduabelah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan.
2. Bilamana dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka keduabelah pihak sepakat untuk menyelesaikan persengketaan, yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan kabupaten Cirebon sesuai domisili pihak penyewa **PIHAK KEDUA**

PASAL VII FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan seperti bencana alam, hulu hara, dan lain lain yang merugikan keduabelah pihak.
2. Kerugian kerugian yang diakibatkan karena Forecemajeur merupakan tanggung jawab lain dalam perjanjian ini, oleh karena itu keduabelah pihak dibebaskan dari tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.



PASAL VIII LAIN - LAIN

1. Bilamana keduabelah pihak menganggap perlu membuat ketentuan tambahan atau perubahan untuk melengkapi perjanjian ini maka diatur tersendiri atau Addendum / amandemen yang sepakati oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangai oleh kedua belah pihak, dalam rangkap dua di atas matrei yang cukup, untuk masing masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Cirebon 1 November 2023

PIHAK KEDUA
Penyewa

Tunani Agustin



PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Cirebon

Dra. Besty Chamin Simatupang, M.Si.